

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

# RENCANA KERJA

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2020**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, kami telah menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020.

Tujuan Rencana Kerja ini dibuat sebagai arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020 yang terurai secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini secara umum belum mampu memberikan atau menyajikan bentuk terbaik, namun kami telah berupaya semaksimal mungkin menyusun Rencana Kerja ini sehingga dapat memberikan gambaran rencana kegiatan Tahun Anggaran 2020 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja ini.

Jambi, Januari 2021

KEPALA DINAS



Drs. ADIL P. ARITONANG  
Pembina Utama Muda

NIP. 19680831 198810 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan tujuan .....	3
1.4. Sistematika Penyusunan Renja .....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU .....	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 .....	5
2.2. Analisis Kinerja Penerimaan SKPD .....	17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD .....	17
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	18
2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	19
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN .....	20
3.1. Telaah terhadap kebijakan nasional, provinsi, daerah .....	20
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja .....	24
3.3. Program dan kegiatan tahun 2020 .....	28
BAB IV PENUTUP .....	38

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2019	..... 14
Tabel 2.2	Realisasi capaian pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2019	..... 16
Tabel 2.4.	Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2019	..... 18
Tabel 3.1	Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	..... 26
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan kegiatan tahun 2020 dan prakiraan maju tahun 2021 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	..... 32

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020 merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja yang disingkat Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, Renja OPD sebagai penjabaran Renstra OPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke dalam program dan kegiatan Dinas sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Dinas secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja OPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan

dengan Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja OPD, yang menitik beratkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan OPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja (Renja) OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja OPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai pihak yang akan melakukan aktifitas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan dengan kondisi dilapangan yang akan dikerjakan pada tahun anggaran berikutnya. Tujuan penyusunan renja lainnya adalah mengarahkan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada renstra sehingga dapat mencapai sasaran dan target program dan kegiatan yang telah direncanakan.

#### **1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Penerimaan OPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 *Review* Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

#### **BAB IV PENUTUP**



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU**

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur, evaluasi Renja dan Renstra masih mengacu ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Lalu juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Lalu meliputi 3 (tiga) hal yaitu : (1) **kebijakan** perencanaan program dan kegiatan, (2) **pelaksanaan** rencana program dan kegiatan, (3) **hasil** rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya;

Disamping itu penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019, juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun lalu sebagai bahan dalam Penyusunan Perencanaan Tahun 2020;

- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun Anggaran 2019 melaksanakan 3 (tiga) Urusan pemerintah yaitu urusan Perumahan dan Permukiman, Pertamanan dan Penerangan Lampu Jalan serta UPTD-SPAM dengan 12 (dua belas) program yaitu:

## **1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**

### **1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) dengan keluaran berupa belanja materai, perangko dan benda pos lainnya. Realisasi fisik 72,44% dan keuangan 74,62%.

### **2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dana tersebut digunakan untuk belanja jasa kantor pembayaran rekening listrik selama 1 tahun. Realisasi fisik 30,06% dan Keuangan 28,09%.

### **3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan**

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 385.600.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah). Dana tersebut digunakan untuk honorarium PNS Panitia Pelaksana Kegiatan dan pengandaan. Realisasi fisik 43,06% dan realisasi keuangan 40,99%.

### **4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor**

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 12.207.500,- (dua belas juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah). Dana tersebut digunakan untuk belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih. Realisasi fisik 80% dan keuangan 77,80%.

## **5. Penyediaan Alat Tulis Kantor**

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 74.385.700,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah). Dana tersebut digunakan untuk belanja alat tulis kantor selama satu tahun. Realisasi fisik 100% dan keuangan 98,95%.

## **6. Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan**

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dana tersebut digunakan untuk belanja cetak dan belanja penggandaan. Realisasi fisik 48,34% dan keuangan 46,18%.

## **7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dana tersebut digunakan untuk belanja alat listrik dan elektronik. Realisasi fisik 0% dan keuangan 0%.

## **8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dana tersebut digunakan untuk langganan surat kabar. Realisasi fisik 72,20% dan keuangan 70%.

## **9. Penyediaan Makanan dan Minuman**

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 351.400.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah). Dana tersebut digunakan untuk belanja penyediaan makanan dan minuman rapat/tamu dan makan minum petugas. Realisasi fisik 57,54% dan realisasi keuangan 55,38%.

## **10. Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah**

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.158.800.000,- (seratus lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Dana tersebut digunakan untuk pembayaran perjalanan dinas ke luar daerah. Realisasi fisik 20,50% dan Realisasi Keuangan 18,31%.

#### **11. Penyediaan Penataan File Kepegawaian**

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.1.445.752.000,- (satu miliar empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah). Dana tersebut digunakan untuk membayar honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap dan penggandaan. Realisasi fisik 70,30% dan Realisasi Keuangan 68,12%.

#### **12. Penyediaan Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah**

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Dana tersebut digunakan untuk pembayaran perjalanan dinas ke dalam daerah. Realisasi fisik 44,83% dan Realisasi Keuangan 42,67%.

### **2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**

#### **1. Pembangunan Gedung Kantor**

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 4.199.385.130,- (empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh rupiah). Dana tersebut digunakan untuk pembayaran alat tulis kantor, penggandaan, perjalanan dinas, belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat, pengadaan bangunan gedung kantor dan pengadaan bangunan gedung tempat ibadah. Realisasi fisik 20,53% dan Realisasi Keuangan 18,27%.

#### **2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor**

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 143.500.000,- (seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dana tersebut digunakan untuk pembelian pengadaan alat rumah tangga, pengadaan komputer, penga-

daan mesin absensi dan pengadaan teralis gedung kantor. Realisasi: fisik 100% dan Realisasi keuangan 95,07%.

### **3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional**

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.120.425.750,- (satu miliar seratus dua puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Dana tersebut digunakan untuk belanja perawatan kendaraan bermotor, penggantian suku cadang, BBM, jasa KIR dan pajak kendaraan bermotor. Realisasi fisik 65,63% dan Realisasi keuangan 64,60%.

### **4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor**

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dana tersebut digunakan untuk belanja pemeliharaan peralatan kantor. Realisasi fisik 14,43% dan Realisasi keuangan 12,27%.

### **5. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor**

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.151.500.000,- (satu miliar seratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Dana tersebut digunakan untuk belanja pemeliharaan konstruksi bangunan dan pengadaan bangunan gedung kantor. Realisasi fisik 22,30% dan Realisasi keuangan 20,11%.

## **3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**

### **1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya**

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 91.675.000 (sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dana tersebut digunakan untuk belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) dan pakaian kerja lapangan. Realisasi fisik 0% dan Realisasi keuangan 0%.

## **4. PROGRAM KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**

### **1. Pendidikan dan Pelatihan Formal**

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Dana tersebut digunakan untuk belanja kursus-kursus singkat/pelatihan. Realisasi fisik 34,20% dan Realisasi keuangan 32,00%.

## **5. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**

### **1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 67.800.000,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah). Dana tersebut digunakan untuk cetak Lakip 2019, Cetak LKPJ 2019, Cetak LPPD 2019, Cetak Perkim Dalam Angka 2019 dan belanja penggandaan. Realisasi fisik 73% dan Realisasi Keuangan 70,80%.

## **6. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

### **1. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)**

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dana tersebut digunakan untuk belanja cetak dan penggandaan. Realisasi fisik 0% dan Realisasi keuangan 0%.

### **2. Evaluasi Rencana kerja**

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dana tersebut digunakan untuk belanja cetak dan penggandaan. Realisasi fisik 0% dan Realisasi keuangan 0%.

## **7. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU**

### **1. Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah**

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.183.825.000,- (satu miliar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Dana tersebut digunakan untuk belanja perjalanan dinas dan pengadaan instalasi air minum. Realisasi fisik 6,75% dan Realisasi keuangan 0,56%.

## **8. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH**

### **1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum**

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 4.979.516.900,- (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah). Dana tersebut digunakan untuk honorarium panitia pelaksana kegiatan, ATK, belanja cetak dan penggandaan, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas, belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat, pengadaan kendaraan bermotor beroda dua, pengadaan komputer dan pengadaan jaringan air minum. Realisasi fisik 20,30% dan Realisasi keuangan 18,12%.

### **2. Operasional UPTD Sistem Penyediaan Air Miumm**

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 4.974.950.000,- (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Dana tersebut digunakan untuk honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, ATK, Belanja perangkat, materai, dan benda pos lainnya, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, belanja peralatan dan perlengkapan kantor, belanja listrik, belanja kawat/faksimili/internet, premi asuransi kesehatan, perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, sewa mobilitas darat, belanja makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, pengadaan alat bengkel tak bermesin, pengadaan alat kantor, pengadaan alat rumah tangga, pengadaan alat komunikasi dan pengadaan jaringan air minum. Realisasi fisik 76,20% dan Realisasi keuangan 74,02%.

## **9. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH**

### **1. Percepatan Sanitasi Permukiman di Daerah**

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.240.936.300,- (satu miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ra-

tus rupiah). Dana tersebut digunakan untuk honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, ATK, belanja cetak dan penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, makanan dan minuman, perjalanan dinas, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, pengadaan kendaraan bermotor beroda empat, pengadaan komputer dan pengadaan bangunan air kotor. Realisasi fisik 66,63% dan Realisasi keuangan 64,46%.

## **10. PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN**

### **1. Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan**

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 15.213.931.820,- (lima belas miliar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah). Dana tersebut digunakan untuk perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, pengadaan jalan lingkungan dan pengadaan jembatan penyeberangan. Realisasi fisik 24,31% dan Realisasi keuangan 22,12%.

### **2. Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah**

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 149.125.000,- (seratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). Dana tersebut digunakan untuk honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, ATK, listrik, belanja cetak dan penggandaan, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan. Realisasi fisik 19,96% dan Realisasi keuangan 17,79%.

## **11. PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU**

### **1. Penataan, Pemeliharaan dan Pengawasan Taman Kota**

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.336.280.000,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Dana tersebut digunakan untuk belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, dekorasi, bahan baku bangunan, bahan/bibit tanaman, bahan kimia, pupuk, perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, penga-



daan bangunan gedung tempat kerja lainnya dan pengadaan taman. Realisasi fisik 39,20% dan Realisasi keuangan 37,00%.

## **2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertamanan**

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah). Dana tersebut digunakan untuk jasa konsultasi penelitian, pengadaan alat pembersih, pengadaan alat sosialisasi, baliho, papan himbauan dan pengadaan serta pemasangan ornamen taman. Realisasi fisik 0% dan Realisasi keuangan 0%.

## **12. PROGRAM PENERANGAN LAMPU KOTA**

### **1. Pemasangan Lampu Jalan, Taman dan Hutan Kota**

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.663.000.000,- (satu miliar enam ratus enam puluh tiga juta rupiah). Dana tersebut digunakan untuk pengadaan alat rumah tangga dan pengadaan instalasi listrik. Realisasi fisik 17,04% dan Realisasi keuangan 14,98%.

### **2. Pemeliharaan Ruti/Berkala lampu Taman**

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 857.200.000,- (delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Dana tersebut digunakan untuk perjalanan dinas dan pemeliharaan instalasi. Realisasi fisik 73,53% dan Realisasi keuangan 71,36%.

Tabel 2.1

**Realisasi Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019**

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH DANA	Target Fisik	Realisasi Fisik	KET
<b>I</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>2.665.945.200</b>			
1	Penyediaan Surat Menyurat	4.050.000	100.00%	74,62%	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000	100.00%	30,06%	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	385.600.000	100.00%	43,06%	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	12.207.500	100.00%	80%	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	74.385.700	100.00%	100.00%	
7	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	43.750.000	100.00%	48,34%	
8	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	100.00%	0%	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	100.00%	72,20%	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	351.400.000	100.00%	57,54%	
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	158.800.000	100.00%	20,50%	
12	Penataan File Kepegawaian	1.445.752.000	100.00%	70,30%	
13	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	120.000.000	100.00%	44,83%	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>6.629.810.880</b>			
1	Pembangunan Gedung Kantor	4.199.385.130	100.00%	20,53%	
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	143.500.000	100.00%	100.00%	
3	Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan dinas/ Operasional	1.120.425.750	100.00%	65,63%	
4	Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kan-	15.000.000	100.00%	14,43%	

	tor				
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	1.151.500.000	100.00%	22,30%	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>91.675.000</b>			
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	91.675.000	100.00%	0%	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>25.000.000</b>			
1	Pendidikan dan Pelatihan formal	25.000.000	100.00%	34,20%	
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>67.800.000</b>			
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	67.800.000	100.00%	73%	
<b>6</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>4.000.000</b>			
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	2.000.000	100.00%	0%	
2	Evaluasi Rencana Kerja	2.000.000	100.00%	0%	
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU</b>	<b>1.183.825.000</b>			
1	Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah	1.183.825.000	100.00%	6,75%	
<b>8</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH</b>	<b>9.954.466.900</b>			
1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum	4.979.516.900	100.00%	20,30%	
2	Operasional UPTD Sistem Penyediaan Air Minum	4.974.950.000	100.00%	76,20%	
<b>9</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH</b>	<b>1.240.936.300</b>			
1	Percepatan Sanitasi Permukiman di Daerah	1.240.936.300	100.00%	66,63%	
<b>10</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN</b>	<b>15.363.056.820</b>			
1	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan	15.213.931.820	100.00%	24,31%	

2	Kegiatan Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	149.125.000	100.00%	19,96%	
<b>11</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU</b>	<b>1.603.280.000</b>			
1	Penataan, Pemeliharaan dan Pengawasan Taman Kota	1.336.280.000	100.00%	39,20%	
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertamanan	267.000.000	100.00%	0%	
<b>12</b>	<b>PROGRAM PENERANGAN LAMPU KOTA</b>	<b>2.520.200.000</b>			
1	Pemasangan Lampu Jalan, Taman dan Hutan Kota	1.663.000.000	100.00%	17,04%	
2	Pemeliharaan Ruti/Berkala Lampu Taman	857.200.000	100.00%	73,53%	
<b>J U M L A H</b>		<b>41.349.996.100</b>	<b>100.00%</b>	<b>36,03%</b>	

Sedangkan untuk capaian pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Realisasi Capaian Pelaksanaan Kegiatan**  
**Dinas Perumahan dan kawasan Pemukiman**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019**

No	Program	Indikator Program	Target Tahun 2019	Capaian Tahun 2019
1	Program penyediaan Sarana Prasarana Air Bersih	Cakupan rumah tangga dengan layanan air bersih	75,15%	72,40%
3	Progrm pembangunan infrastruktur perdesaan	Persentase jalan lingkungan kondisi baik	36,70%	32,86%
4	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase taman yang terbangun	77%	68%

5	Program penerangan lampu kota	Persentase penerangan lampu kota	66%	33,6%
6	Program Penyediaan saran dan prasarana Sanitasi	Persentase Sanitasi layak	67%	73%

## 2.2 Analisis Kinerja Penerimaan OPD

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan dinas yang dipercaya sebagai Dinas untuk meningkatkan Target pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Target sebesar Rp. 117.500.000,- . Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2019 adalah sebesar Rp. 78.224.344,-. Penerimaan Retribusi ini, Dinas Perumahan dan Kawasan hanya memiliki peran sebagai Rekomendasi di dalam retribusi IMB. Kemudian Retribusi pemakaian kekayaan daerah target sebesar 25.000.000,- . Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah tahun 2019 sebesar 25.647.813,-. Retribusi ini merupakan tahun pertama yang dilakukan pemungutan retribusinya. Selanjutnya adalah Retribusi dari penjualan hasil PDAM yang berasal dari UPTD Spam yang memiliki target sebesar 950.000.000, penerimaan pada retribusi ini pada tahun 2019 sebesar 1.100.471.200. pada penerimaan penjualan hasil PDAM ini terjadi peningkatan 77,24 % dari target tahun 2018 sebesar 850.000.000,-

## 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Beberapa hal yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang disertai dengan perbaikan sarana dan prasarana lingkungan perumahan seperti jalan jalan lingkungan, parit/drainase dll.
2. Serah terima PSU Perumahan untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup masyarakat.
3. Terlaksananya penanganan kawasan kumuh yang tercantum dalam SK Bupati Tanjung Jabung Timur.

## 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019, menetapkan prioritas pembangunan pada Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM/ PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	target					
					2018	2014	2015	2016	2017	2019
1	Berkurangnya wilayah kawasan kumuh	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh	%	5.11	5.00	5.01	5.05	5.05	5.12
2	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik (%)	%	31.63	30.00	31.20	31.20	27.43	36.70
3	1.Persentase rumah tangga yang memanfaatkan air bersih, 2. Persentase rumah tangga yang bersanitasi layak	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	%	66.90	65.20	65.70	65.70	66.90	
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	Proporsi RT dg akses berkelanjutan terhadap air minum layak	%	57.20	52.20	55.23	56,20	15.75	
3	Meningkatnya penyiapan penataan pertamanan dan RTH	Pogram pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase taman yang terbangun	%	67	55.37	66.89	78.41	58	77
		Penerangan lampu kota	Persentase LPJU yang Terpasang	% %	49	100 -	100 -	100	31	66
3	Tata Kelola Pemerintah yang baik	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rasio Pelayanan	%	100	-	-	100	100	100
		Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur								
		Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya SDM Aparatur	%	100	-	100	100	100	100
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		%	100	-	100	100	100	100
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan	Tercapainya tujuan organisasi	%	100	-	100	100	100	100
		Perencanaan SKPD	Terwujudnya tujuan OPD	%	100	-	100	100	100	100
		Pengembangan	Tercaainya	%	100	-	100	100	100	100

		Data & Informasi	Data yang akurat							
--	--	------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--

Review Rancangan Awal Renja RKPD Tahun 2019, meliputi aspek :

1. Perumahan dan Permukiman

- Percepatan serah terima prasarana, sarana dan utilitas (PSU) Perumahan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari pengembang perumahan kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan peningkatan pemahaman masyarakat tentang rumah sehat melalui penyuluhan-penyuluhan dikelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Penyuluhan rumah sehat serta inventarisasi rumah tidak layak huni.

2. Pengendalian pemanfaatan ruang kota

Untuk menciptakan kawasan yang tertata, tertib dan teratur maka diperlukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan membentuk tim pengawasan yang bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta pengendalian terhadap perizinan yang dikeluarkan.

**2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan melalui Musrenbang melalui aplikasi Simreda (Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah) dan yang akan menjadi prioritas utama harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Memiliki dampak yang signifikan, terukur dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat;
2. Mekanisme dan prosedur pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Sesuai dan sejalan dengan Visi, Misi, Program Daerah yang telah dituangkan dalam RPJM Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021.

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN**

##### 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi, Daerah

Kebijakan Nasional yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan antara lain:

###### 3.1.1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Kebijakan Nasional perumahan dan kawasan permukiman yang termaktub dalam pasal-pasal berikut:

- Bab II.2 Huruf D 5: Memenuhi kebutuhan hunian bagi Masyarakat untuk mewujudkan Kota tanpa permukiman kumuh.
- Bab IV.1.5. Butir 19: Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada penyelenggaraan pembangunan perumahan yang terjangkau daya beli masyarakat

Arah kebijakan perumahan dan kawasan permukiman yang dimatkan dalam Undang- Undang nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Program Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana, sarana, permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, efisien.
- 2) Penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana, sarana pendukungnya yang mandiri mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan



- 3) Pembangunan Perumahan beserta prasarana, sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup

### 3.1.2. Undang - Undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, pembangunan perumahan tercantum pada pasal 129 huruf a yaitu: Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Amanat pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia sesuai pasal 15 adalah sebagai berikut:

- 1) menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi;
- 2) menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- 3) menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- 4) menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota dalam penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;
- 5) melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan;
- 6) industri bahan bangunan yang mengutamakan sumberdaya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan;
- 7) melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelak-

- sanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- 8) melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota;
  - 9) melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
  - 10) melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;
  - 11) melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
  - 12) melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
  - 13) mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
  - 14) mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;
  - 15) memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR;
  - 16) menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba; dan
  - 17) memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya.

### 3.1.3. Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tahun 2015 tentang Rencana Strategi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019

Pada Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tahun 2015, tercantum visi, misi, arah kebijakan dan pengembangan kebijakan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan Badan Perumahan sebagai be-

rikut:

- Visi : Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.
- Misi yang berkaitan dengan Bidang Perumahan Rakyat : Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua".

Sasaran Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat :

- 1) Meningkatnya Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data dan Informasi serta Evaluasi Kinerja Pengembangan perumahan
- 2) Terbangunnya 550.000 unit sarusun (satuan rumah susun) yang dilengkapi PSU pendukungnya.
- 3) Terbangunnya 50.000 unit rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritim dan perbatasan negara.
- 4) Terwujudnya keswadayaan untuk peningkatan kualitas dan pembangunan rumah/hunian yang layak dan terjangkau bagi 1.750.000 Masyarakat Berpenghasilan Rendah
- 5) Pembinaan umum dan pengembangan rumah umum dan komersial:
  - a. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan rumah umum dan komersial
  - b. Terselenggaranya pencadangan tanah dan pembangunan Rusun melalui penyertaan modal negara untuk Perum Perumnas
  - c. Terasilitasinya Pengelolaan Rumah Susun Sewa bagi MBR yang dilaksanakan oleh BUMN.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

#### **3.2.1. Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

- 1) Menciptakan sinergitas pelaksanaan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman
- 2) Menciptakan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pelaksanaan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman

Tujuan organisasi adalah sebagai berikut :

- 1) Keberpihakan para pengembang untuk membangun rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- 2) Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mewujudkan secara swadaya permukiman yang layak huni.
- 3) Meningkatkan kualitas lingkungan dalam rangka mencegah dan mengurangi luas kawasan kumuh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 4) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait lampu jalan dan pertamanan.

#### **3.2.2. Sasaran Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Sasaran Badan Perumahan dalam mewujudkan tujuan organisasi melalui penyusunan Rencana Kerja OPD adalah :

- 1) Mendorong terciptanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- 2) Mendorong terciptanya kepastian dan perlindungan hukum dalam bermukim;
- 3) Menyusun Norma Standar Panduan Manual (NSPM) bidang perumahan dan kawasan permukiman berbasis masyarakat;
- 4) Mengembangkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat;
- 5) Meningkatkan fasilitasi dan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;
- 6) Meningkatkan peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- 7) Meningkatkan kapasitas SDM dan pelaku pembangunan Perumahan

dan Kawasan Permukiman;

- 8) Mendorong pelaksanaan penataan ruang kawasan perumahan dan kawasan permukiman yang transparan dan partisipatif;

Tabel 3.1  
Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

TUJUAN	SASARAN	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021
2	3	6	16	18
Meningkatkan mutu pelayanan pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Presentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100%	100%
		Jumlah Materai	2.722 buah	2.722 buah
		Pembayaran jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 kali	12 kali
		Pembayaran jasa administrasi administrasi keuangan	1 tahun	1 tahun
		Pengadaan perlatan kebersihan kantor	4 kali	4 kali
		Pengadaan alat tulis kantor	1 tahun	1 tahun
		Jumlah jenis barang cetakan, jumlah pengadaan	143.000 lembar	143.000 lembar
		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	110 buah	110 buah
		Pembayaran tagihan surat kabar	1 tahun	1 tahun
		Pembayaran makan minum rapat/tamu	1 tahun	1 tahun
		Pembayaran koordinasi dan konsultasi luar daerah	1 tahun	1 tahun

	Pembayaran jasa-kerja PHTT	11 kali	11 kali
	Pembayaran monitoring, evaluasi dalam daerah	1 tahun	1 tahun
	<b>persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Jumlah ruang / gedung kantor yang terpelihara	2 unit	2 unit
	Jumlah kendaraan yang roda 2, roda 3, roda 4	2 unit	2 unit
	Jumlah peralatan gedung / kantor yang terpelihara	27 unit	27 unit
	Jumlah kendaraan yang dipelihara	R 2/18, R 3/3, R4/7, R6/4, alat berat/2, alat kebersihan/22	R 2/18, R 3/3, R4/7, R6/4, alat berat/2, alat kebersihan/22
	Jumlah perlengkapan gedung / kantor yang terpelihara	27 unit	27 unit
	Jumlah gedung kantor yang direhab	2 unit	2 unit
	<b>persentase peningkatan disiplin Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Jumlah pakaian dinas ASN	189 stell	180 stell
	<b>presentase peningkatan sumber daya aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	10 orang	10 orang
	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>B</b>	<b>BB</b>

		Jumlah laporan keuangan, perjanjian kinerja, LAKIP,LKPJ dan LPPD yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen
		<b>persentase tersedianya dokumen Renstra dan Dokumen Renja</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		Tersedianya aksesibilitas menjalankan kegiatan		
		Jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	2 dokumen
		Jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	2 dokumen
		<b>Persentase pengurangan luas kawasan kumuh</b>	<b>5,11%</b>	<b>5,09%</b>
<b>Meningknya pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman</b>	<b>Berkurangnya wilayah kawasan kumuh</b>	Persentase pengelolaan DAK sanitasi	5,11%	5,09%
		Persentase ketersediaan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan	100,00%	100,00%
		<b>Persentase tersedianya hunian layak huni (MBR) bagi masyarakat</b>	<b>62,73%</b>	<b>63,07%</b>
		persentase sarana dan prasarana permukiman perumahan	7%	2%
		<b>Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik (%)</b>	<b>40,59%</b>	<b>44,22%</b>
	<b>Meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan lingkungan</b>	Panjang Jalan Lingkungan	5.227	5.489
		Jumlah Rumah Layak Huni	500	500

	<b>Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan</b>	-	-
	<b>Persentase Sanitasi Layak</b>	<b>67,00%</b>	<b>67,23%</b>
	Jumlah Sambungan Rumah	3.975	2.589
	<b>Proporsi RT dg akses berkelanjutan terhadap air minum layak</b>	<b>77,90%</b>	<b>80,65%</b>
	Jumlah Sumur Yang Dibangun	12	15
	Jumlah Sambungan Rumah	1025	1030
	Jumlah Sambaungan Rumah	5.690	6.770
	<b>persentase taman yang terbangun</b>	<b>88%</b>	<b>100%</b>
<b>Meningkatnya penyiapan penataan pertamanan dan RTH</b>	Jumlah Taman	<b>8</b>	<b>9</b>
	Jumlah Sarana Prasarana Penunjang Taman	<b>60</b>	<b>77</b>
	<b>persentase Jumlah LPJU yang terpasang</b>	<b>83%</b>	<b>100%</b>
<b>Meningkatkan keselamatan transportasi darat</b>	Jumlah Lpju yang Terpasang	5121	6170
	Jumlah Lpju Yang Terpelihara	2195	8972

### 3.3. Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020

Rencana program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 adalah sebagai berikut :



1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  - d. Penyediaan jasa Kebersihan Kantor
  - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - h. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan
  - i. Penyediaan Makanan dan Minuman
  - j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
  - k. Penataan File Kepegawaian
  - l. Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a. Pembangunan Gedung Kantor
  - b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
  - c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
  - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
  - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
  - f. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja & Keuangan
  - a. Penyusunan Lelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
  - a. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
  - b. Evaluasi Rencana Kerja
6. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
  - a. Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
  - b. Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
7. Program Penyediaan Sarana Prasarana Air Bersih
  - a. Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah

- b. Operasional UPTD Sistem Penyediaan Air Minum
- 8. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
  - a. Penataan, Pemeliharaan dan Pengawasan Taman Kota
  - b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertamanan
- 9. Program Penerangan Lampu Kota
  - a. Pemasangan Lampu Jalan, Taman dan Hutan Kota
  - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Taman
- 10. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
  - a. Percepatan Sanitasi Permukiman di Daerah
- 11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
  - a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah

Untuk keterangan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dijelaskan dalam tabel Renja hasil e-Planning 2020 terlampir sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Sumber Dana		
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kineja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	APBD II	APBD I	APBN
1.	<b>PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>				<b>3.085.180.264,40</b>			<b>3.376.402.000,00</b>			
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tertatanya administrasi surat menyurat kantor	Kab. Tanjung Timur	Tersedianya jasa surat menyurat selama 12 bulan	2.900.000		Terse- dianya jasa surat me- nyurat se- lama 12 bulan	3.000.000	V	-	-
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Fasilitas Air, Listrik, Telepon dan Internet kantor yang baik	Kab. Tanjung Timur	Pembayaran Rekening listrik, air, telepon, dan internet selama 12 bulan	60.000.000		Pembaya- ran Reken- ing listrik, air, telepon, dan inter- net selama 12 bulan	65.000.000	V	-	-
	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pen- gelolaan admini- strasi keuangan	Kab. Tanjung Timur	12 Bulan	556.800.000		12 Bulan	600.000.000	V	-	-
	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya ke- bersihan dan ke- nyamanan kantor	Kab. Tanjung Timur	Tersedianya kebersihan dan kenyamanan kantor selama 1 tahun	12.207.500		Terse- dianya ke- bersihan dan ke- nyamanan kantor se- lama 1 ta- hun	20.000.000	V	-	-

5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terselenggaranya kegiatan kantor yang baik	Kab. Tanjung Timur	Tersedianya ATK selama 12 Bulan	69.267.700		Tersedianya ATK selama 12 Bulan	75.000.000	V	-	-
6.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terselenggaranya kegiatan kantor yang baik	Kab. Tanjung Timur	Tercukupinya Pengadaan Barang cetakan & Photo Copy selama 12 Bulan	31.150.000		Tercukupinya Pengadaan Barang cetakan & Photo Copy selama 12 Bulan	35.150.000	V	-	-
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Terwujudnya Penerangan kantor	Kab. Tanjung Timur	Tersedianya komponen instalasi listrik kantor selama 12 bulan	6.500.000		Tersedianya komponen instalasi listrik kantor selama 12 bulan	15.500.000	V	-	-
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tanjung Timur	Terpenuhinya Bahan Bacaan Surat Kabar dan Peraturan Perundang-undangan selama 1 tahun	5.000.000		Terpenuhinya Bahan Bacaan Surat Kabar dan Peraturan Perundang-undangan selama 1 tahun	5.000.000	V	-	-
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman rapat, tamu dan petugas selama 1 Tahun	Kab. Tanjung Timur	Terpenuhinya Makanan dan Minuman rapat, tamu dan petugas selama 1 Tahun	392.200.000		Terpenuhinya Makanan dan Minuman rapat, tamu dan petugas selama 1 Tahun	392.200.000	V	-	-
10.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Tanjung Timur	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan	63.603.064,40		Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	250.000.000	V	-	-

							rah selama 1 Tahun			
	11. Penataan File Kepegawaian	Tersedianya Jasa Kerja PHTT dan Premi Asuransi	Kab. Tanjab Timur	Terlaksananya Jasa Kerja PHTT dan Premi Asuransi selama 1 Tahun	1.795.552.000		Terlaksananya Jasa Kerja PHTT dan Premi Asuransi selama 1 Tahun	1.795.552.000		
	12. Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Terselenggaranya perjalanan dinas dalam daerah	Kab. Tanjab Timur	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah selama 12 bulan	90.000.000		Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah selama 12 bulan	120.000.000		
2.	<b>PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			Kab. Tanjab Timur	<b>12.299.399.344</b>			<b>16.362.399.344</b>		
	1. Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Bangunan gedung kantor	Kab. Tanjab Timur	Terpenuhinya gedung tempat kerja	11.099.939.344		Terpenuhinya gedung tempat kerja	15.099.939.344	V	-
	2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedia Perlengkapan Kantor	Kab. Tanjab Timur	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor	131.400.000		terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor	131.400.000	V	-
	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya service penggantian suku cadang dan BBM kendaraan dinas	Kab. Tanjab Timur	Terwujudnya operasional dinas menggunakan kendaraan dinas selama 1 tahun	1.045.610.000		Terwujudnya operasional dinas menggunakan kendaraan dinas selama 1 tahun	1.095.610.000	V	-

	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan alat-alat kantor	Kab. Tanjung Timur	Terselenggaranya pemeliharaan rutin berkala alat kantor selama 1 tahun	22.450.000		Terselenggaranya pemeliharaan rutin berkala alat kantor selama 1 tahun	35.450.000	V	-	-
3.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>				Kab. Tanjung Timur	<b>50.000.000</b>			<b>50.000.000</b>			
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya peningkatan sumber daya aparatur	Kab. Tanjung Timur	Terlaksananya pendidikan untuk ASN sebanyak 10 orang	50.000.000		Terlaksananya pendidikan untuk ASN sebanyak 10 orang	50.000.000	V	-	-
4.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>				Kab. Tanjung Timur	<b>82.800.000</b>			<b>82.800.000</b>			
	1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Kinerja Dinas	Kab. Tanjung Timur	Tersusunnya Laporan LAKIP, RKT, TAPKIN, dan IKU	82.800.000		Tersusunnya Laporan LAKIP, RKT, TAPKIN, dan IKU	82.800.000	V	-	-
5.	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>				Kab. Tanjung Timur	<b>9.200.000</b>			<b>9.200.000</b>			
	1.	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Dinas	Kab. Tanjung Timur	Tersusunnya Renja, RKA, DPA, dan Laporan Tahunan	6.700.000		Tersusunnya Renja, RKA, DPA, dan Laporan Tahunan	6.700.000	V	-	-

	2. Evaluasi Rencana Kerja	Tersedianya Dokumen Evaluasi Rencana Kerja Dinas	Kab. Tanjab Timur	Tersedianya Dokumen Evaluasi Rencana Kerja sebanyak 2 dokumen	2.500.000		Terse- dianya Do- kumen Eva- luasi Ren- cana Kerja sebanyak 2 dokumen	2.500.000			
6	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN</b>			Kab. Tanjab Timur	<b>22.056.195.119.86</b>			<b>22.056.195.119.86</b>			
	1. Pembangunan jalan dan jembatan Perdesaan	Tersedianya jalan dan jembatan perdesaan	Kab. Tanjab Timur	Meningkatnya Penyediaan jalan dan jembatan perdesaan	20.372.463.119,86		Meningkatnya Penyediaan jalan dan jembatan perdesaan	20.372.463.119,86	V	-	-
	2. Pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Tersedianya Perumahan Bagi masyarakat Berpenghasilan rendah	Kab. Tanjab Timur	Meningkatnya Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	1.683.732.000		Meningkatnya Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	1.683.732.000			
7	<b>PROGRAM PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH</b>			Kab. Tanjab Timur	<b>14.060.636.000</b>			<b>14.071.636.000</b>			
	1. Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah	Tersedianya sarana prasarana air bersih	Kab. Tanjab Timur	Dimilikinya sarana dan prasarana yang lengkap	489.398.000		Tersusunnya arsip kajian teknis perijinan selama 1 tahun	500.398.000	V	-	-
	2. Operasional UPTD Sistem Penyediaan Air Minum	Tersedianya Operasional UPTD SPAM	Kab. Tanjab Timur	Meningkatnya Penyediaan Operasional UPTD SPAM	5.005.180.000		Meningkatnya Penyediaan Operasional UPTD SPAM	5.005.180.000			

	1. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Tersedianya sarana prasarana penunjang kegiatan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Kab. Tanjung Timur	Dimilikinya sarana dan prasarana yang lengkap kegiatan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	8.566.058.000		Dimilikinya sarana dan prasarana yang lengkap kegiatan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	8.566.058.000			
8.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU</b>			Kab. Tanjung Timur	<b>4.307.703.200</b>			<b>4.407.703.200</b>			
	1. Penataan, Pemeliharaan dan Pengawasan Taman Kota	Tersedianya sarana prasarana penunjang kegiatan pertamanan	Kab. Tanjung Timur	Dimilikinya sarana dan prasarana yang lengkap	3.850.303.200		Dimilikinya sarana dan prasarana yang lengkap	3.850.303.200	V	-	-
	2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertamanan	Tersedianya sarana prasarana penunjang kegiatan pertamanan	Kab. Tanjung Timur	Dimilikinya sarana dan prasarana yang lengkap	457.400.000		Dimilikinya sarana dan prasarana yang lengkap	557.400.000	V	-	-
9.	<b>PROGRAM PENERANGAN LAMPU KOTA</b>			Kab. Tanjung Timur	<b>2.069.467.645</b>			<b>2.069.467.645</b>			
	1. Pemasangan Lampu Jalan, Taman dan Hutan Kota	Tersedianya sarana prasarana penunjang kegiatan Penerangan Lampu Kota	Kab. Tanjung Timur	Dimilikinya sarana dan prasarana kegiatan Penerangan Lampu Kota	1.061.500.000		Dimilikinya sarana dan prasarana kegiatan Penerangan Lampu Kota	1.061.500.000	V	-	-
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Taman	Tersedianya sarana prasarana penunjang kegiatan penerangan jalan, lampu taman	Kab. Tanjung Timur	Dimilikinya sarana dan prasarana kegiatan penerangan jalan, lampu taman	1.007.967.645		Dimilikinya sarana dan prasarana kegiatan penerangan	1.007.967.645	V	-	-



							jalan,lampu taman 0 lokasi			
10.	<b>Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitas</b>			Kab. Tanjab Timur	<b>1.706.557.000</b>			<b>1.706.557.000</b>		
	1. Percepatan Sanitasi Pemukiman di daerah	Tersedianya sarana prasarana penunjang kegiatan percepatan Sanitasi Pemukiman	Kab. Tanjab Timur	Dimilikinya sarana dan prasarana yang lengkap untuk penunjang kegiatan percepatan Sanitasi Pemukiman	1.706.557.000		Dimilikinya sarana dan prasarana yang lengkap untuk penunjang kegiatan percepatan Sanitasi Pemukiman	1.706.557.000		
<b>JUMLAH</b>					<b>60.472.338.573,26</b>			<b>64.937.560.308,86</b>		<b>Rp- Rp-</b>

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur

## **BAB IV PENUTUP**

Salah satu upaya untuk memberikan layanan yang terbaik kepada Masyarakat pada sektor perumahan rakyat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur senantiasa berusaha untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021 dan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Namun kami menyadari bahwa program dan kegiatan yang sudah kami tuangkan dalam Rencana Kerja sebagai rujukan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman belum maksimal .

Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Tahun 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sudah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

- Berdasarkan Evaluasi yang di laksanakan ada beberapa kegiatan yang belum dapat di laksanakan , hal ini disebabkan karena masih terbatasnya Anggaran yang tersedia .
- Ada beberapa kegiatan yang progressnya belum maksimal, hal ini disebabkan karena sarana penunjang perlu ditingkatkan telah mencapai 100% atau telah maksimal.

Untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan sektor perumahan kepada masyarakat maka diharapkan ada peningkatan anggaran yang dialokasikan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman , sehingga capaian pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara maksimal dan komprehensif.

Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang transparan dan akuntabel serta komprehensif maka pembangunan perumahan dan prasarana , sarana dan utilitas pendukung dapat berjalan secara baik dan optimal sehingga semua pelaksanaan kegiatan ini sepenuhnya dapat mendukung visi, misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ada beberapa hal yang secara terus-menerus perlu mendapat perhatian sehingga kebutuhan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) secara

bertahap dapat dipenuhi. Sebagai upaya untuk melakukan percepatan pemenuhan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni harus dilaksanakan melalui berbagai sumber dana, diantaranya adalah dana APBD, APBN serta peran aktif seluruh masyarakat yang di usulkan secara hirarkhi melalui SIPKD milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini kami buat sesuai dengan ketentuan-ketentuan / aturan-aturan yang lebih berlaku dan kebijakan Kepala Daerah dan Dewan yang terhormat. Hal ini perlu dilaksanakan dalam rangka untuk melakukan penyesuaian penyesuaian dengan kebutuhan yang diperlukan.

Demikian untuk di maklumi terima kasih.

KEPALA DINAS



Drs. ADHE P. ARITONANG  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680831 198810 1 001